

**PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LPM
MELALUI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS RISET**

**Workshop Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset
Pimpinan LPM/P3M/LP3M/PPM PTAI Se-Indonesia
Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI**

**dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Malang
26-31 Agustus 2010**

I. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional, pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh semua civitas akademika perguruan Tinggi. Seiring dengan pengajaran dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan bersama-sama dan saling memiliki keterkaitan erat dan saling mendukung. Ketiga komponen Tri Dharma tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus dilaksanakan secara terpadu.

Dalam kaitan dengan itu, di lingkungan PTAI telah dilakukan berbagai model program pengabdian masyarakat. Di antara program itu adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN), Desa Binaan, penyuluhan keagamaan, dan program pemberdayaan madrasah, masjid, dan masyarakat marjinal, serta pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri oleh berbagai kalangan PTAI. Kebebasan melakukan program pengabdian ini melahirkan begitu banyak varian kegiatan dan hasil kerja. Begitu pula lapangan yang menjadi sasaran juga begitu luas mulai masyarakat marginal di pedesaan sampai komunitas berkecukupan di perkotaan yang memendam kegersangan spiritualitas.

Luasnya komunitas masyarakat yang berada dalam posisi marginal, mengakibatkan banyaknya kawasan yang belum tersentuh kegiatan pengabdian masyarakat, baik di pedesaan, perkotaan, pesisir, dan komunitas terpencil, seperti komunitas perambah hutan dan komunitas yang masih berpola hidup nomaden lainnya. Luasnya bidang obyek pengabdian kepada masyarakat tersebut memberikan kesempatan kepada PTAI untuk

melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di masing-masing kawasan. Bidang garap tambahan yang memberikan peluang bagi program pengabdian masyarakat adalah kegersangan spiritualitas masyarakat yang telah maju secara fisik material di perkotaan dan pembinaan terus-menerus terhadap jamaah masjid, komunitas Muslim yang menjadi sasaran misi agama lain dan masyarakat yang menerima dampak industrialisasi.

Kondisi komunitas ini biasanya membutuhkan banyak pembinaan keagamaan akibat minimnya pusat belajar keagamaan, lapangan pekerjaan yang tidak memadai, sisi keagamaannya pun laksana mu'allaf karena pengetahuan keislamannya kurang, layanan dan akses pendidikan juga minim. Kondisi ini biasanya dibarengi dengan kesadaran hukum yang rendah dan berhiaskan gejala mudanya usia perkawinan dan tingginya angka perceraian.

Berbagai kebijakan pemerintah tidak jarang turut andil dalam memperbesar banyaknya area krisis di masyarakat. Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) atau berbagai tarif lainnya yang disebut sebagai konsekuensi dari pencabutan subsidi telah meletakkan beban yang semakin berat kepada masyarakat kelas bawah.

Bersamaan dengan itu, menyempitnya lapangan kerja dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menimbulkan berbagai masalah sosial baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi bagi kelompok masyarakat berketerampilan rendah yang tidak mudah memperoleh akses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dan berbagai pola kapitalisasi pendidikan lainnya telah menyeret mereka dalam kondisi yang buruk dalam bursa pasar kerja.

Paparan tersebut, di samping memberikan gambaran betapa luas area pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan PTAI, sekaligus menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan sebaiknya memperoleh penyelesaian.

Sementara itu, banyaknya sumber daya manusia yang ada di lingkungan PTAI belum memberikan harapan yang menjanjikan bagi kinerja pengabdian masyarakat. Secara umum kualifikasi para pengabdian tersebut belum mencapai standar tenaga ahli pemberdayaan umat. Ketidakseragaman proses peningkatan kapasitas barangkali yang melahirkan kondisi SDM semacam ini.

Persoalan tentang struktur kelembagaan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) khususnya di lingkungan IAIN yang belum seragam, belum adanya penghargaan bagi dosen sebagai

stimulus dalam pengabdian, dan minimnya pedoman pelaksanaan yang terpadu, rendahnya tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa dalam mendukung program LPM, dan minimnya publikasi hasil pengabdian menyebabkan program pengabdian masyarakat yang dilakukan PTAI ini terasa miskin makna (*meaningless*). Program pengabdian masyarakat PTAI tidak tampak cukup jelas dalam mempresentasikan kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Hal inilah yang juga barangkali melatarbelakangi minimnya kebijakan anggaran pengabdian masyarakat di lingkungan PTAI.

Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka program pengabdian masyarakat PTAI akan semakin tidak berdaya menghadapi masalah yang begitu kompleks dan bertubi. Apalagi dalam beberapa kondisi tidak jarang masyarakat memiliki sikap mental yang pragmatis, apatis, berperilaku konsumtif, dan tidak mau berusaha mandiri dan enggan melepaskan diri dari ketergantungan dan masalah. Berbagai masalah tersebut membutuhkan pembacaan yang cermat agar memperoleh kesimpulan diagnostik yang tepat untuk mengambil tindakan penyelesaian. Kehadiran kerangka riset dalam program pengabdian masyarakat tidak dapat ditawar lagi.

Besarnya jumlah kuantitas SDM, sistem dan pranata yang ditetapkan, dan kerjasama dengan jejaring kelembagaan masyarakat yang memiliki kesamaan agenda dalam pengabdian masyarakat sebaiknya ditujukan untuk mengatasi berbagai ancaman yang menggerogoti integritas masyarakat, seperti tingginya angka angka anak sekolah, tindak kriminalitas terus meningkat, kesenjangan sosial kian tinggi dan psikologi masyarakat yang terganggu akibat industrialisasi.

Munculnya mental yang berorientasi pada keuntungan material jangka pendek, baik yang dialami SDM LPM maupun yang membudaya di masyarakat, minimnya konsistensi kebijakan lembaga yang mempengaruhi pelaksanaan kerja pengabdian masyarakat, dan minimnya sinergi program pemerintah dengan LPM dengan berbagai *stakeholders* akan terus mengikis besarnya potensi SDM pengabdian masyarakat yang dimiliki PTAI.

Alhasil, luasnya kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat tidak selalu dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai kesempatan berkontribusi untuk melakukan perubahan di lingkungan masyarakat. Tidak jarang, program dan kegiatan yang dilaksanakan begitu "monoton" [itu ke itu saja] dan tidak menampilkan kreatifitas dan terobosan yang tinggi. Kondisi tersebut

semakin akut ketika tidak ada apresiasi terhadap kinerja tim atau LPM yang sudah bekerja serius dan menunjukkan hasil yang optimal baik dalam bentuk konsistensi asistensi anggaran atau bentuk lainnya.

Terbatasnya asistensi pendanaan untuk melaksanakan kegiatan serta susahny memperoleh dana operasional menjadikan tidak adanya jaminan bahwa kinerja yang positif akan memperoleh respons yang positif dan apresiasi yang memadai. Secara kelembagaan, LPM tidak memiliki otonomi dalam merancang anggaran. Otoritas dalam pelaksanaan program pun sangat terbatas dan masih dicampuri keterlibatan unsur birokrasi lain yang tidak pada tempatnya. Keterbatasan sarana pelaksanaan program pengabdian masyarakat seperti alat transportasi yang dapat digunakan untuk upaya mobilisasi SDM ke lokasi pengabdian sering menimbulkan pemborosan anggaran.

Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam konteks pengabdian masyarakat masih sebatas koordinasi dan belum berujud kerjasama kemitraan yang erat dan seimbang mulai dari perancangan, pendanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi kegiatan. Hal ini membutuhkan peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya sinergi program pemerintah dengan LPM sehingga tidak jarang apa yang dilakukan program yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan itu berseberangan dengan program pengabdian masyarakat LPM.

Atmosfir dan kultur akademik di kampus sering kali kurang mendukung semangat untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ditambah dengan minimnya kebutuhan administrasi kepegawaian (angka kredit) dalam bidang pengabdian menjadikan jumlah dosen yang siap melakukan pengabdian dengan terjun di lapangan hanya berkisar 40% dari seluruh SDM yang ada. Sementara lemahnya penguasaan metodologi pengabdian masyarakat berbasis riset juga memberikan andil dalam melemahnya kinerja pengabdian masyarakat, sehingga tidak dapat mencapai hasil yang membanggakan dan diakui di seluruh lapisan publik. Ditambah dengan munculnya mental yang berorientasi pada keuntungan material jangka pendek, baik yang dialami SDM LPM, menjadikan program pengabdian masyarakat ini menjadi terjebak dalam *profit oriented*.

Program ini ditujukan untuk melakukan analisis secara kritis terhadap kondisi program pengabdian masyarakat PTAI, untuk selanjutnya disusun inisiatif tindakan yang mungkin dilakukan

dalam lima tahun terakhir dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan kontribusi nyata PTAI dalam pembangunan bangsa.

II. Tujuan Program

A. Tujuan Umum (Goal)

- a) Menguatnya Struktur Kelembagaan LPM yang tersusun dalam suatu dokumen peraturan keorganisasian yang berdampak pada pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
- b) LPM memiliki keleluasaan dalam pengembangan sistem manajemen program, SDM dan penganggaran berbasis kinerja.
- c) Penguatan dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis riset melalui desa binaan sebagai laboratorium sosial keagamaan.
- d) Tercapainya kerjasama di bidang riset dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta baik di dalam maupun luar negeri.
- e) Terwujudnya sistem data base yang valid dan akurat berbasis ICT dalam menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta deseminasi program LPM.

B. Tujuan Strategis

- a) Kelembagaan
 - 1) Adanya nomenklatur yang menata struktur kelembagaan LPM.
 - 2) Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam kelembagaan LPM.
 - 3) Terwujudnya struktur organik di setiap kelembagaan LPM untuk mendukung akselerasi kinerja pengabdian masyarakat yang lebih optimal.
- b) Manajemen
 - 1) LPM menerapkan sistem pengelolaan program berbasis kinerja.
 - 2) LPM menerapkan sistem pengelolaan SDM pengabdian masyarakat berkualitas yang berbasis kinerja.
 - 3) LPM menerapkan sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
- c) Program

- 1) Tersusunnya pedoman pengelolaan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset.
 - 2) Tersedianya tenaga yang memiliki kemampuan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset (PAR).
 - 3) Terpilihnya wilayah binaan (desa / kelurahan) sebagai lokasi program pemberdayaan berbasis riset.
 - 4) Adanya rintisan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset di masing-masing LPM.
 - 5) Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat berbasis riset
 - 6) Terwujudnya desa yang berfungsi sebagai laboratorium sosial keagamaan yang layak digunakan sebagai media belajar bersama.
- d) Kerjasama
- 1) Pendataan, pemetaan, dan penjajagan lembaga-lembaga yang memiliki potensi sebagai mitra kerjasama.
 - 2) Membangun mitra kerjasama LPM antar perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri.
 - 3) Membangun mitra kerjasama LPM dengan pemerintah dan swasta baik dalam dan luar negeri.
- e) Dokumentasi dan Publikasi
- 1) Penyusunan data base kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan mudah diakses.
 - 2) Membangun sistem informasi pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, dan masyarakat.
 - 3) Mewujudkan publikasi ilmiah hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website, jurnal nasional dan internasional, serta buku sebagai referensi akademik.

C. Tujuan Operasional (Output)

Aspek	Tujuan Operasional
<p>a. Kelembagaan</p>	<p>Tahun Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya satu draft instrumen usulan struktur kelembagaan oleh LPM. • Terumuskannya satu dokumen nomenklatur struktur kelembagaan LPM yang dapat mendukung kinerja LPM oleh Diktis kasubdit Kelembagaan. <p>Tahun Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya satu keputusan nomenklatur struktur kelembagaan LPM oleh DIKTIS.. • Diterapkannya nomenklatur struktur kelembagaan LPM pada setiap PTAI. • LPM memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
<p>b. Manajemen</p>	<p>Tahun Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPM memiliki rencana strategis. • LPM memiliki rencana operasional tahunan. <p>Tahun Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPM memiliki Prosedur Standar Operasional (SOP) pengelolaan program pengabdian masyarakat <p>Tahun Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya rancangan program yang terpadu dan berkelanjutan. • Tersedianya alokasi anggaran sesuai dengan program yang direncanakan. • Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi program dan capaian kinerja. <p>Tahun Keempat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. <p>Tahun Kelima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya sistem rekrutmen dan pengelolaan relawan pengabdian masyarakat.

<p>c. Program</p>	<p>Tahun Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman pengelolaan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset (PAR) • Tersedianya tenaga yang memiliki kemampuan metodologi PAR untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset. • Terpilihnya desa / kelurahan sebagai lokasi program pemberdayaan berbasis riset. <p>Tahun Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPM memiliki rintisan program pengabdian kepada masyarakat dengan metodologi PAR. • Terlaksananya proses pemberdayaan masyarakat dengan metodologi PAR. <p>Tahun Ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya refleksi pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis PAR. <p>Tahun Keempat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desiminasi pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis PAR. • Terwujudnya pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil refleksi pengalaman lapangan. <p>Tahun Kelima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya produksi pengetahuan hasil pengabdian masyarakat berupa publikasi ilmiah yang terakreditasi. • Terwujudnya desa binaan sebagai laboratorium sosial keagamaan yang siap digunakan sebagai pusat pembelajaran masyarakat (Community Learning Centre-CLC).
<p>d. Kerjasama</p>	<p>Tahun pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data lembaga-lembaga pengabdian yang menjadi mitra LPM meliputi LPM antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta baik dalam dan luar negeri yang berpotensi menjadi

	<p>mitra kerjasama.</p> <p>Tahun kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kerjasama antara mitra yang disepakati dengan penetapan MoU antar pemerintah dan perguruan tinggi dalam negeri. <p>Tahun ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kerjasama antara mitra yang disepakati dengan penetapan nota kerjasama pelaksanaan program antar pemerintah dan perguruan tinggi dalam negeri. <p>Tahun Keempat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kerjasama antara mitra yang disepakati dengan penetapan MoU antar pemerintah dan perguruan tinggi luar negeri. <p>Tahun Kelima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kerjasama antara mitra yang disepakati dengan penetapan nota kerjasama pelaksanaan program antar pemerintah dan perguruan tinggi luar negeri.
<p>e. Dokumentasi dan Publikasi</p>	<p>Tahun pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan mudah diakses oleh publik. • Adanya website yang dapat diakses secara interaktif oleh semua pihak. <p>Tahun kedua dan ketiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat publikasi ilmiah hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website, jurnal nasional dan internasional, serta buku sebagai referensi akademik. <p>Tahun keempat dan kelima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat publikasi ilmiah hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal internasional.

III. Kegiatan Utama

Aspek	Kegiatan Utama
a. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Inisiasi penyusunan draft instrumen usulan struktur kelembagaan• Advokasi pengusulan penetapan Nomenklatur Struktur Kelembagaan LPM• Implementasi Nomenklatur Struktur Kelembagaan LPM/P3M• Pengadaan dokumen susunan draft instrumen usulan tugas pokok dan fungsi kelembagaan LPM• Advokasi pengusulan tugas pokok dan fungsi kelembagaan LPM/P3M kepada Diktis• Implentasi ketentuan tugas pokok dan fungsi kelembagaan LPM/P3M pada setiap PTAI• Penguatan Konsolidasi SDM di setiap LPM/P3M untuk menyusun struktur organik penggerak kinerja LPM.
b. Managemen	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan perencanaan strategis.• Penyusunan rencana operasional program jangka pendek, menengah dan panjang.• Penyusunan Prosedur Standar Operasional (SOP) pengelolaan program pengabdian masyarakat.• Perancangan program yang terpadu dan berkelanjutan.• pengelolaan anggaran sesuai dengan program yang direncanakan.• Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi program dan capaian kinerja.• Penyusunan mekanisme pengembangan kapasitas sumberdaya manusia.• Penyusunan mekanisme rekrutmen dan pengelolaan relawan pengabdian masyarakat.
c. Program	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan pedoman pengelolaan program pemberdayaan masyarakat

	<p>berbasis riset (PAR).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan PAR bagi dosen untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat berbasis riset. • Penjajagan wilayah binaan (desa/kelurahan) sebagai rencana lokasi pengabdian masyarakat berbasis riset. • Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dengan menggunakan metodologi PAR. • Pelaksanaan refleksi pengabdian masyarakat berbasis PAR. • Penyusunan pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil refleksi pengalaman lapangan. • Desiminasi pengabdian masyarakat berbasis PAR. • Penyusunan hasil pengabdian masyarakat untuk publikasi ilmiah dalam bentuk buku, film dan dokumentar. • Mempromosikan desa binaan sebagai laboratorium sosial keagamaan yang siap digunakan sebagai pusat pembelajaran masyarakat (<i>Community Learning Centre-CLC</i>) kepada publik.
<p>d. Kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan data base lembaga-lembaga pengabdian yang menjadi mitra LPM meliputi LPM antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta baik dalam dan luar negeri yang berpotensi menjadi mitra kerjasama. • Penjajagan kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta baik dalam dan luar negeri yang berpotensi menjadi mitra kerjasama. • Perumusan nota kerjasama antara mitra yang disepakati dengan penetapan MoU antar pemerintah dan perguruan tinggi dalam negeri dengan prinsip kesetaraan. • Perumusan program kerjasama antara

	<p>mitra yang disepakati dengan penetapan nota kerjasama pelaksanaan program antar pemerintah dan perguruan tinggi dalam negeri dengan prinsip kesetaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan nota kerjasama antara mitra yang disepakati dalam MoU antar pemerintah dan perguruan tinggi luar negeri dengan prinsip kesetaraan. • Perumusan program kerjasama antara mitra yang disepakati dengan penetapan nota kerjasama pelaksanaan program antar pemerintah dan perguruan tinggi luar negeri dengan prinsip kesetaraan.
e. Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan mudah diakses oleh publik. • Pengoperasian website yang dapat diakses secara interaktif oleh semua pihak. • Publikasi ilmiah hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website, jurnal nasional dan internasional, serta buku sebagai referensi akademik. • Mempublikasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal internasional.

IV. Penerima Manfaat Program

- LPM/PPM
- Masyarakat komunitas binaan PTAI
- PTAI
- Lembaga Pemerintah dan swasta

V. Kerjasama/Kolaborasi

Dalam rangka mendorong keberhasilan program peningkatan kinerja pengabdian masyarakat LPM di lingkungan PTAI ini, dibutuhkan kerjasama/kolaborasi antar berbagai pihak baik di lingkungan internal kementerian agama maupun lingkungan eksternalnya. Kerja sama internal terutama dibutuhkan untuk mengawal kebijakan yang terkait

dengan penguatan kelembagaan dan penataan manajemen LPM serta memadukan sistem dan prosedur yang dijadikan pegangan bersama.

Kerjasama internal meliputi jajaran direktorat jenderal pendidikan Islam direktorat pendidikan tinggi Islam pada sub direktorat penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah, biro perencanaan, organisasi dan tata laksana, rektor/ketua PTAL, dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).

Sebagai sebuah lembaga yang menangani masalah pengabdian masyarakat, LPM memerlukan langkah kerjasama eksternal dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Kerjasama yang bisa dijalin oleh LPM adalah kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan pihak pemerintah setempat, lembaga swasta, perusahaan, masyarakat dan para stakeholder yang lain. Kolaborasi ini diperlukan karena permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam penanganannya. Permasalahan kemiskinan misalkan, tidak hanya bisa diselesaikan oleh LPM saja, namun juga harus ada dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti: pemerintah setempat, lembaga swasta, perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan masyarakat setempat secara partisipatif.

VI. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan program ini membutuhkan monitoring dan evaluasi agar program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus dilakukan secara terpadu dengan terlebih dahulu dibuatkan sebuah konsep yang jelas sesuai dengan tujuan dan capaian program yang telah ditetapkan di atas.

VII. Sumberdaya Yang Dibutuhkan

Sebuah program tidak akan bisa jalan dapat adanya dukungan sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya manusia (*man*), sumber daya alam (*material*) dan sumber pendanaan (*money*). Sumber daya manusia berupa tenaga ahli

yang memiliki kemampuan pemberdayaan masyarakat berbasis Participatory Action Research (PAR). Dibutuhkannya tenaga ahli yang demikian karena permasalahan yang terjadi di masyarakat membutuhkan proses penyadaran untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri secara partisipatoris dan emansipatoris, sehingga mereka memiliki kemandirian dan keberdayaan. Tenaga ahli ini bisa disediakan oleh lembaga pengabdian masyarakat PTAI dengan cara merekrut dosen-dosennya untuk diberi pelatihan tentang PAR. Sementara itu sumberdaya alam bisa tersedia dari lingkungan/kondisi geografis masyarakat setempat. Sedangkan sumber pendanaan yang dibutuhkan tidaklah sedikit, untuk itu perlu *share* antara lembaga pengabdian masyarakat dengan kementerian agama pusat, pemerintah setempat, lembaga swasta, perusahaan dan lembaga-lembaga donator lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.